BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tiongkok merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia serta pertumbuhan ekonominya yang tumbuh dengan sangat pesat. Dibawah pemerintahan Hu Jintao, Tiongkok menekankan kebijakan luar negeri dengan menunjukkan bahwa Tiongkok terbuka untuk bekerjasama dengan negara manapun karena hanya dengan kerjasama setiap negara bisa menciptakan perdamaian. Ide ini dilatarbelakangi oleh citra di masa lalu, yaitu kecurigaan negara-negara lain akan kebangkitan Tiongkok akan menjadi sebuah ancaman bagi negara lain. Dengan kebijakan yang berpijak pada perdamaian, ini bukan berarti Tiongkok akan menjauh dari tujuan pengembangan perekonomian, terutama karena Tiongkok telah terintegrasi ke dalam proses globalisasi, tetapi perdamaian yang diangkat Tiongkok adalah bagian dari proses pencapaian perkembangan ekonomi dan peningkatan perekonomian standar hidup masyarakat Tiongkok selama beberapa dekade ke depan, dan untuk mencapai tujuan - tujuan ini Tiongkok tidak akan mengganggu stabilitas internasional atau menekan negara manapun.

Tiongkok yang terus meningkat, pertumbuhan industri transportasi yang disebabkan adanya urbanisasi penduduk dari desa ke kota tidak dipungkiri harus didukung dengan suplai energi yang cukup. Untuk mencapai keamanan energi, Tiongkok harus dapat menjaga ketersediaan energi yang cukup dan keamanan

distribusinya. Pada dimensi ketersediaan energi yang cukup, permintaan Tiongkok terhadap energi sangat tinggi. Namun, tingginya permintaan minyak ini tidak dapat dipenuhi oleh Tiongkok melalui pasokan energi domestiknya. Oleh karena itu, memaksa Tiongkok untuk mencari persediaan energinya yang cukup. Namun, tempat ekspansi Tiongkok dalam mencari kebutuhan suplai minyaknya rawan konflik. Konflik tersebut mampu mempengaruhi suplai energi Tiongkok dan keamanan distribusi hasil produksi minyak tersebut untuk dikirim ke Tiongkok. faktor-faktor ini yang mampu mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara dalam mengamankan suplai energinya baik dalam mengamankan persediaan energinya maupun tetap menjaga keamanan distrbusinya. Untuk mengatasi permasalahan ketidakamanan energinya, Tiongkok melakukan ekspansi ke negara-negara Afrika yang notabenenya negara yang memiliki sumber daya alam. Tiongkok telah menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional untuk mendapatkan persediaan energinya yang cukup ke dalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik yaitu untuk melakukan ekspansi ke Sudan. Tiongkok meilhat Sudan sebagai negara *Less-Developed Countries* (LDCs) yang memiliki skor indeks pembangunan manusia berada di tingkat menengah ke bawah, sektor industri yang belum berkembang serta upah buruh yang masih sangat murah. Hal ini dilandaskan pada faktor situasional di lingkungan domestik Tiongkok dan Tiongkok melihat faktor internasional dengan melihat keamanan energi meliputi adanya ancaman gejolak harga minyak dan keamanan distribusi (Medeiros, 2009:2-4).

Terjadinya gejolak harga minyak dikarenakan mayoritas cadangan minyak dunia berada di kawasan Timur Tengah. Selain itu, adanya upaya dari negara-negara barat

untuk memonopoli sumber daya minyak. Selama ini negara-negara barat sangat bergantung pada modal, teknologi dan kekuatan militer mereka sehingga mereka dengan mudah memonopoli produksi dan menentukan harga penjualan minyak dunia. Selama ini mayoritas suplai minyak Tiongkok berasal dari negara- negara Timur Tengah dengan memasok total kebutuhan suplai minyak sebesar 51%. Berangkat dari hal tersebut, Tiongkok merasa perlu untuk melakukan diversifikasi rute impor agar tidak bergantung kepada satu produsen. Oleh karena itu, Tiongkok melakukan kerjasama dengan negara-negara *Less-Developed Countries* (LDC's) yang memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti Sudan. Hal ini yang menjadi tujuan kebijakan luar negeri Tiongkok untuk mendorong perusahaan minyak nasionalnya *China National Petroleum Corporation* (CNPC) untuk mencari persediaan energi yang cukup dengan melakukan ekspansi ke Sudan. Untuk memberikan insentif dan melindungi perusahaan minyak nasionalnya serta untuk mendapatkan akses aman energi minyaknya maka Pemerintah Tiongkok mengeluarkan kebijakan *Go Out Policy* (http://www.esi.nus.edu.sg/docs/event/wu-kang.pdf Diakses pada tanggal 3 Juli 2017).

Tiongkok mengeluarkan kebijakan *Go Out Policy* dengan tujuan untuk mendorong perusahaan minyak nasionalnya untuk mengikuti jejak perusahaan-perusahaan minyak internasional dalam rangka mendapatkan cadangan minyak serta untuk mendapatkan pendapatan dari sektor hulu (eksplorasi dan produksi). Dalam kebijakan *Go Out Policy* ini mengemukakan sedikit tentang isi kebijakanya dengan cara menggunakan strategi kebijakannya dan fungsinya sebagai perusahaan minyak energi Tiongkok yaitu meningkatkan sumber dengan berusaha untuk

memaksimalkan dan disversifikasi sumber daya minyak dan gas, memastikan pengganti tertib cadangan, dan mempertahankan kepemimpinan dari bisnis CNPC dari hulu ke hilir. *China National Petroleum Corporation* (CNPC) memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi distribusi minyak Tiongkok dari kegiatan eksplorasi di negara lain. Setelah dikeluarkannnya kebijakan *Go Out Policy*, Perusahaan minyak nasionalnya seperti *China National Petroleum Corporation* (CNPC) mulai tumbuh dengan meningkatnya pertumbuhan *Foreign Direct Investmen*t Tiongkok (FDI) di berbagai negara salah satunya di Afrika. *China National Petroleum Corporation* (CNPC) pada saat ini memiliki aset minyak utama di Sudan dengan menguasai sektor industri energi di negara tersebut. Selain itu, *China National Petroleum Corporation* (CNPC) merupakan salah satu produsen minyak dan gas terbesar di Tiongkok dan pemasok kebutuhan suplai minyak dan bisnis meliputi minyak dan gas operasi, layanan teknis, rekayasa dan konstruksi, manufaktur peralatan, keuangan layanan dan pengembangan energi terbarukan. Saat ini, *China National Petroleum Corporation* (CNPC) memiliki investasi minyak dan gas di 29 negara dan menyediakan layanan ladang minyak di lebih dari 50 negara dan wilayah di seluruh dunia. Seluruh tujuan investasi Tiongkok di negara-negara Afrika bertujuan untuk mendapatkan akses aman terhadap suplai energinya.

Namun, tempat investasi Tiongkok mengalami konflik seperti halnya yang terjadi di Sudan. Konflik yang terjadi di Sudan mengakibatkan pemberhentian eksplorasi minyak pada awal tahun 2012 dan sepanjang tahun 2013-2014 adanya terus upaya dari Sudan untuk memblokade jalur pipa minyak yang digunakan oleh Sudan Selatan. Oleh karena itu, untuk mengamankan keamanan suplai energi dan distribusi

minyak Tiongkok di Sudan, Tiongkok mengembangkan kebijakan *good and friendly neighbour diplomacy* dan kebijakan yang dkeluarkan *China National Petroleum Corporation* (CNPC) sama dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan *China National Petroleum Corporation* (CNPC) hanya memiliki satu stakeholder saja yaitu pemerintah. Pemerintah memiliki kedaulatan untuk mempengaruhi dan mengendalikan *China National Petroleum Corporation* (CNPC), seluruh senior manajer *China National Petroleum Corporation* (CNPC) ditunjuk oleh pemerintah pusat dan semuanya dipandang sebagai pejabat, serta Presiden *China National Petroleum Corporation* (CNPC) memiliki kedudukan setingkat menteri. Hal ini dikarenakan menteri dari kementrian energi ditunjuk sebagai presiden *China National Petroleum Corporation* (CNPC) (http://csr.cnpc.com.cn/csr/xhtml/PageAssets/CNPCinSudan.pdf Diakses pada tanggal 3 Juli 2017).

Konflik yang terjadi di Sudan telah menganggu kegiatan eksplorasi minyak Tiongkok dan mengganggu keamanan distribusi minyak. Oleh karena itu, untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan yaitu dengan mengembangkan kebijakan *Good and Friendly Neighbour Diplomacy*. Kebijakan luar negeri Tiongkok ini dibentuk pada masa Hu Jintao. Pada masa Hu Jintao berbeda dengan masa Jiang Zemin, dimana Hu Jintao lebih menekankan kepada keseimbangan dan tindakan pragmatis. Prinsip-prinsip ini yang akan memandu kebijakan luar negeri Tiongkok di Negara *periphery* seperti Sudan dengan saling menghormati kedaulatan dan integritas territorial, saling tidak mencampuri urusan dalam negeri, kesetaraan dan saling menguntungkan, dan hidup berdampingan secara damai. Kebijakan *Good and Friendly Neighbour Diplomacy* ditunjukkan Tiongkok pada saat setelah Sudan

Selatan memisahkan diri dari Sudan. Perwakilan Presiden Hu Jintao menghadiri upacara hari kemerdekaan Sudan Selatan. Jiang Weixin sebagai menteri kontruksi dan pembangunan Tiongkok saat itu telah menandatangani komunikasi bersama dengan pejabat Sudan Selatan dan mengakui Sudan Selatan sebagai negara baru, serta membangun hubungan diplomatik. Menteri Luar Negeri Yang Jiechi segera mengunjungi Sudan Selatan dan meningkatkan hubungan perdagangan dan pembangunan bilateral kedua Negara.

Selama kunjungan resmi pertamanya, Menteri Luar Negeri Yang Jiechi menunjukkan "Prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai" hal ini merupakan pengembangan dari kebijakan *Good and Friendly Neighbour Diplomacy* atau yang biasa disebut sebagai *Great Peripheral Diplmoacy*. Pada saat shutdown produksi minyak Sudan, Menteri luar negeri Tiongkok menjanjikan bantuan dalam ekonomi dan sosial pembangunan, mulai dengan menghadiahkan pembangunan untuk dua sekolah menengah, membangun rumah sakit, melakukan pertukaran pelajar, dan mengirimkan para ahli di Sudan untuk belajar mengelola energi di Tiongkok serta Tiongkok untuk mengamankan distribusi hasil produk minyak Sudan Selatan dengan memberikan dana untuk membangun rute pipa minyak alternatif dari Kenya menuju pelabuhan Lamu dan Uganda dengan menigirim 1.500 pekerja dari Tiongkok. Jika kita melihat keseluruhan sikap dan aktifitas Tiongkok untuk mengatasi permasalahan keamanan energinya, Tiongkok menerapkan kebijakan *Loan For Oil Diplomacy*. Kebijakan *Loan for oil diplomacy* merupakan kebijakan pemerintah Tiongkok untuk mendukung perusahaan minyak nasionalnya di negara lain untuk meminjamkan sejumlah dana pada pemerintah negara lain dengan tujuan sebagai ganti kelancaran

merger, akuisisi, atau kesepakatan ekuitas minyak yang diperoleh di masa mendatang (http:www.china.org.cn/2009-09/11/content_18509242.htm Diakses pada tanggal 3 Juli 2017).

Pada tahun 2012 Sudan Selatan memberhentikan seluruh produksi minyaknya. Hal ini membuat Tiongkok sebagai investor utama minyak di kedua Sudan merasa khawatir jika pemberhentian produksi minyak dalam waktu yang lama. Manajer *China National Petroleum Corporation* (CNPC) menyatakan bahwa hubungan mereka dengan para pejabat pemerintah dan masyarakat kedua negara Sudan selama ini baik. Tetapi mereka menyatakan bahwa selama perusahaan *shutdown* tidak menghasilkan uang dan harus mengurangi tenaga kerja. Manajer *China National Petroleum Corporation* (CNPC) mengklaim bahwa situasi akan menjadi lebih baik ketika meningkatkan komposisi tenaga kerja lokal dari kedua Sudan sehingga produksi minyak dapat berjalan kembali seperti semula. Perusahaan terus memberikan beberapa layanan untuk masyarakat yang tinggal dekat dengan tempat penampungan. Layanan tersebut meliputi membangun klinik yang terbuka untuk orang-orang biasa dan tentara menjaga daerah minyak, merekrut warga sipil untuk bertugas di klinik serta *China National Petroleum Corporation* (CNPC) mengoperasikan layanan ambulans yang juga menguntungkan beberapa masyarakat kedua Sudan. Pada masa *shutdown* tersebut, *China National Petroleum Corporation* (CNPC) telah menutup Operasinya di Blok 1, 2 dan 4, sedangkan di Blok 3 dan 7 tetap beroperasi dengan tingkat minimum kehadiran staf. Model hubungan antara perusahaan minyak nasional Tiongkok dengan pemerintah Tiongkok, untuk mendukung dan melindungi *China National Petroleum Corporation* (CNPC) di

tempat pencarian kebutuhan suplai minyaknya dengan melakukan *diplomatic support*. Fokus Beijing pada saat itu yaitu perlindungan investasi dan warga negara Tiongkok di Sudan Selatan. Investasi yang cukup besar dalam mengembangkan dan mengoperasikan sektor minyak, Sudan menjadi sangat penting bagi *China National Petroleum Corporation* (CNPC) dan menjadi fokus utama bagi pemerintah. *Diplomatic Support* ini diwujudkan pada tanggal 4 April 2012 terjadinya pertemuan antara Sudan Selatan, Tiongkok, dan Sudan di Brussels. Pada pertemuan tersebut menghasilkan saran untuk pemerintah Sudan Selatan salah satunya yaitu mengelola hubungan dengan Tiongkok sehingga untuk mengejar tuntutan jangka pendek yang sah di sektor minyak tanpa membahayakan hubungan politik dan ekonomi yang lebih luas (http://www.iea.org/freepublications/overseas_China Diakses pada tanggal 3 Juli 2017).

Pada hal ini mengorbankan politik dan ekonomi yang lebih luas seperti halnya yang terjadi ketika perusahaan-perusahan minyak nasional Amerika Serikat menarik investasinya di Sudan akibat konflik yang berkepanjangan. Selain itu, Amerika Serikat melakukan embargo agar perusahaan-perusahaan negara barat tidak melakukan inevstasi di Sudan. Hal ini yang membuat kedua negara Sudan merasa khawatir jika para investor terutama terutama Tiongkok menarik investasinya dan akan berdampak sangat buruk bagi kedua Sudan. Pada saat shutdown tersebut tidak ada upaya yang dilakukan perusahaan asing lainnya untuk mengamankan investasinya di kedua Sudan. Sedangkan, ekspor minyak kedua Sudan untuk Tiongkok terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2011 ekspor minyak kedua Sudan untuk Tiongkok hanya sekitar 66%. Namun, setelah

dilakukannya hubungan diplomatik di kedua Sudan, ekspor minyak kedua Sudan untuk Tiongkok telah mengalami peningkatan sekitar 80% pada tahun 2012 dan 86% pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan Tiongkok telah menjadi mitra utama dalam minyak ke dua Sudan dan tidak menutup kemungkinan seluruh hasil produksi minyak kedua Sudan dapat diekspor ke Tiongkok (http://csr.cnpc.com. cn/csr/xhtml/PageAssets/CNPCinSudan.pdf Diakses pada tanggal 3 Juli 2017).

Alasan mengapa Tiongkok memilih Sudan sebagai salah satu mitra utama dalam minyak ini, Tiongkok melihat Sudan merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti memiliki cadangan gas sekitar 3 trilliun kubik, blok eksplorasi minyak yang lebih luas, hasil produk minyak Sudan sangat berkualitas karena rendah sulfur dan timbal yang sesuai dengan fasilitas penyulingan yang dibangun oleh Tiongkok. Selain itu, Tiongkok memilih Sudan juga dikarenakan cadangan energi yang dimiliki oleh Sudan sekitar 6,7 milliar Barrel dan diyakini memiliki cadangan minyak yang belum diekploitasi. Di kedua Sudan, Tiongkok mendapatkan minyak dengan sangat mudah melalui pendekatan yang dilakukan Tiongkok dengan kedua pemerintah Sudan. Namun Tiongkok hanya memakai suplai minyak dari kedua Sudan untuk pemenuhan ketersediaan energinya hanya sekitar 5-7% sepanjang tahun 2011-2014. Tiongkok dalam konflik Sudan telah bersikap ganda. Hal ini dapat dilihat disatu sisi Tiongkok menudukung perdamaian di Sudan, dan disisi lain Tiongkok semakin memperkeruh kondisi di Sudan.

Tiongkok juga telah terlibat dalam kegiatan perdamaian regional, melindungi dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Sudan Selatan. Selain itu, disatu sisi menudukung perdamaian di Sudan, namun disisi lain meningkatnya ekspor senjata

Tiongkok ke Sudan. Pada tahun 2003, ketika Sudan melakukan penyerangan ke Darfur, Sudan membeli alat pengeboman yang bernama 20 A-5C *fantan fighter bombers* dan mampu menembak dalam satu serangan. Senjata-senjata tersebut yang digunakan Sudan dalam konflik Darfur, meskipun pada saat itu Dewan Keamanan PBB melakukan embargo PBB sejak tahun 2005. Dalam mengejar dekat hubungan perdagangan senjata dengan pemerintah Sudan, Tiongkok telah berusaha untuk merusak upaya PBB untuk menjatuhkan sanksi rezim Omar al-Bashir selaku presiden Sudan saat itu (http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A21143-2004Dec22.html Diakses pada tanggal 3 Juli 2017).

Sepanjang konflik tahun 2011-2014, pemerintah Sudan dan Sudan Selatan telah menghabiskan sebanyak 80% dari pendapatan penjualan minyak untuk membeli senjata dari Tiongkok. Tiongkok telah mensuplai senjata kepada pemerintah Sudan berupa tank buatan Tiongkok, alat bom, helikopter, senapan mesin, granat berpeluncur roket, dan amunisi, yang semuanya digunakan untuk perang saudara di negara tersebut. Tiongkok juga telah membantu mendirikan tiga pabrik senjata di Sudan, termasuk salah satu yang merakit T-55 tank. Tiongkok telah menjual senjata kepada pemerintah Sudan sebesar $ 100.000.000 atau senilai dengan pesawat tempur Shenyang. Investasi asing langsung (FDI) Tiongkok di Sudan sekarang lebih dari $ 4 miliar. Tiongkok melakukan pendekatan kepada pemerintah Sudan dan Sudan Selatan dengan memberikan pasokan senjata dengan tujuan untuk meningkatkan ekspor minyak kedua negara Sudan ke Tiongkok. Dengan Tiongkok mengekspor senjata kepada kedua Sudan maka Tiongkok menerima pendapatan dan telah mengembalikan pemberian pinjaman Tiongkok kepada kedua Sudan. Selain itu

Tiongkok melakukan hal tersebut tidak hanya di Sudan melainkan dibeberapa negara di kawasan Afrika teurtama yang berbatasan dengan pelabuhan.

Tiongkok juga telah membangun pangkalan militer di pelabuhan strategis Djibouti Ethiopia. Djibouti memang terletak di kawasan yang sangat strategis. Negara bekas jajahan Prancis itu merupakan pintu masuk untuk menuju Laut Merah dan Terusan Suez yang sangat penting bagi perdagangan dunia. Selain itu, keamanan pertahanan Tiongkok telah memanifestasikan dalam kebijakan yang menempatkan prioritas tinggi pada memaksimalkan keamanan di sekitar pinggiran Tiongkok, terutama karena waktunya berkaitan dengan perbatasan pertahanan dan integritas teritorial. Oleh karena itu, Tiongkok perlu untuk memaksimalkan keamanan di sekitar pinggiran Tiongkok dengan menaruhkan pengaruh kekuatan militernya di negara *periphery* seperti di Sudan. Hal inilah yang menjadi alasan Tiongkok melakukan ekspor senjata kepada pemerintah Sudan dengan alasan juga untuk *defensive* atau menekankan pada pertahanan Tiongkok (http://elshinta. com/news/11009/2015/05/10/tiongkok-ingin-bangun-pangkalan-militer-di-kawasan-tanduk-afrika Diakses pada tanggal 3 Juli 2017).

Alasan Tiongkok menyebarkan kekuatan militernya di ujung Afrika termasuk Sudan yaitu untuk mengamankan distribusi minyak dari negara produsen untuk sampai ke Tiongkok. Hal ini dikarenakan hampir seluruh pipa minyak yang dibuat Tiongkok di tempat pencarian keamanan energinya di kawasan Afrika dibuat menuju pelabuhan. Berangkat dari hal ini, Tiongkok harus menaruh kekuatan militernya di negara-negara dekat pelabuhan untuk menjaga keamanan distribusi minyaknya untuk sampai ke Tiongkok. Selain itu, ada upaya rencana Tiongkok untuk membangun rute

pipa alternatif untuk Sudan Selatan melalui Ethiopia menuju pelabuhan Djibouti. Hal ini dikarenakan Tiongkok harus mengupayakan beberapa cara untuk tetap menjaga keamanan distribusi minyak dari Sudan untuk sampai ke Tiongkok.

Sektor minyak kedua Sudan bagi Tiongkok merupakan strategi jangka panjang dalam menjaga ketersediaan energi minyak Tiongkok. Tiongkok merasa ladang minyak kedua Sudan seperti ladang minyak Tiongkok sendiri yang berada di luar Tiongkok. Selain itu, Tiongkok ingin menerapkan pengaruhnya dengan menanamkan investasinya di Sudan (*Sphere Of Influence*). Oleh karena itu, melalui memberikan lingkup pengaruh di kedua Sudan atau di Negara *periphery* melalui pendekatan *Good and Friendly Negihbour Diplomacy* tersebut maka Tiongkok akan mendapatkan "dukungan suara" jika terjadi voting di mahkamah Internasional mengenai permasalahan-permasalahan yang melibatkan Tiongkok. Hubungan Tiongkok dengan kedua Sudan merupakan suatu keberhasilan Tiongkok untuk mengatasi permasalahan kebutuhan suplai energi dan Tiongkok juga berhasil memperoleh kuntungan dari ke dua negara (http://www.zerohedge.com/news/2015-05-10/china - open - military - base - horn - africa- next - critical- oil - transit- choke – point diakses pada tanggal 3 Juli 2017).

Dalam memudahkan peneliti untuk mengkaji Kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap kebutuhan energi minyak di sudan melalui *China National Petroleum Corporation* (CNPC) tahun 2011-2014. Penelitian menggunakan penelitian terdahulu yaitu karya ilmiah yang berupa jurnal ilmu hubungan internasional yang di lakukan oleh (Astrid Ezhara Sinaga) dengan masalah yang berjudul (*Keberadaan Cina Dalam Penyelesaian Konflik Sudan dan Sudan Selatan*) dari Universitas

Wulawarman pada tahun 2013. Dalam penelitian ini Astrid membahas keberadaan Tiongkok dalam menyelesaikan konflik secara damai tanpa berpihak ke salah satu negara. Kesamaan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang kebutuhan minyak dan keberadaan Tingkok di dalamnya. Perbedaannya peneliti membahas mengenai bagaimana Kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap kebutuhan energi minyak di sudan melalui *China National Petroleum Corporation* (CNPC) tahun 2011-2014.

Kedua yaitu jurnal ilmu hubungan internasional yang diteliti oleh (Indah Rahmayeni) dari kampus Universitas Riau dengan judul (*Kebijakan China melakukan kerjasama energi minyak dengan Sudan*). Dimana penelitian yang dilakukan oleh Indah Rahmayeni ini membahas bagaimana Kebijakan luar negeri china melakukan kerjasama energi minyak dengan Sudan. Kesamaan dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti kebutuhan minyak di Sudan. Perbedaan juga penelitian yang dilakukan oleh Indah Rahmayeni ini hanyalah masalah tentang bagaimana Tiongkok melakukan kebijakan–kebijakan dalam kebutuhan suplai yang berada di Sudan, sedangkan peneliti ingin meneliti bagaimana Kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap kebutuhan energi minyak di Sudan melalui *China National Petroleum Corporation* (CNPC) tahun 2011-2014. Yang diketahui bahwa Tiongkok mempunyai tujuan tertentu dalam investasi tersebut yang di khususkan kepada sumber daya alam minyak yang berlimpah di perbatasan Heglig dan Abey yang berada di Sudan.

Dengan paparan yang sudah dijelaskan diatas, maka menjadi dasar pertimbangan peneliti untuk melakukan peneliti dengan judul:

"KEBIJAKAN LUAR NEGERI TIONGKOK DALAM KEBUTUHAN ENERGI MINYAK DI SUDAN MELALUI *CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION* (CNPC) TAHUN 2011-2014"

Adapun judul yang ingin diteliti mempunyai beberapa pendukung mata pelajaran yaitu:

1. Politik Luar negeri, mata kuliah ini mengajarkan arah kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk kepentingan nasional negara tersebut dalam lingkup dunia internasional. Politik luar negeri merupakan bagian dari strategi politik nasional suatu negara yang berbeda dengan politik luar negeri negara lain.
2. Analisis Politik Luar Negeri, mata kuliah ini mengajarkan bagaimana menganalisa suatu negara yang berfocus pada kebijakan-kebijakan dan regulasi dari suatu negara yang spesifik baik dominasi kepentingan nasionalnya dan dominatif dari sisi global.
3. Organisasi Internasional, mata kuliah ini mengajarkan organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional secara sukarela atau atas dasar kesamaan yang bertujuan menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional. Pada hakikatnya organisasi internasional memiliki arti luas dan sempit. Secara luas, organisasi internasional meliputi organisasi publik (*public international organization*), organisasi privat (*privat international organitation*), organisasi regional, organisasi subregional, dan organisasi bersifat universal (*organization of universal character*).

4. Diplomasi dan Negoisasi, mata kuliah ini mengajarkan salah satu praktek dalam Hubungan internasional antar negara melalui perwakilan-perwakilan resmi. Praktek diplomasi dapat meliputi keseluruhan proses hubungan luar negeri dan formasi kebijakan. Disebutkan bahwa diplomasi juga diartikan alat atau mekanisme kebijakan luar negeri yang dijadikan sebagai tujuan akhir, juga diartikan sebagai teknik-teknik operasional yang akan dilakukan oleh sebuah negara untuk memperjuangkan kepentingannya melalui hukum.
5. Hubungan internasional di Timur Tengah, merupakan studi yang mempelajari konfik-konflik di Timur Tengah khususnya kepada konflik minyak dan mempelajari bagaimana keamanan di kawasan Timur Tengah.

1.1 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Dalam penelitian ini penelitian mengajukan pertanyaan mayor yaitu “Bagaimana kebijakan luar negeri Tiongkok dalam kebutuhan energi minyak di Sudan melalui *China National Petroleum Corporation* (CNPC) tahun 2011-2014?”.

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Dalam penelitian ini peneliti menarik beberapa pertanyaan minor sebagai berikut:

1. Apa saja kebijakan yang dikeluarkan oleh Tiongkok melalui *China National Petroleum Corporation* (CNPC)?
2. Sejauh mana kebutuhan Tiongkok dengan suplai minyak dari Sudan ?
3. Bagaimana kebutuhan energi minyak Tiongkok dalam ketersediaan pasokan energi minyak Tiongkok di Sudan?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah diajukan oleh peneliti agar mempersempit fokus terhadap masalah. Dari permasalahan yang ada, penulis membatasi masalah yang dibahas dengan berfokuskan pada kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap kebutuhan suplai energi minyaknya di Sudan khususnya dengan melalui *China National Petroleum Corporation* (CPNC) periode yang akan diteliti dari tahun 2011 sampai dengan 2014 dimana tahun 2011-2014 Tiongkok memulai kebutuhanya dalam kepentingan nasionalnya dan juga dalam kebijakan kebijakan yang di keluarkan oleh Hu Jintao serta menggunakan *China National Petroleum Corporation* (CPNC) sebagai aset Tiongkok untuk melakukan investasi minyak, gas eksplorasi, produksi, penyulingan, bahan kimia, gas alam, pipa, serta pemasaran dan perdagangan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah agar masyarakat umum mengetahui Kebijakan luar negeri Tiongkok dalam kebutuhan energi minyak di Sudan melalui *China National Petroleum Corporation* tahun 2011-2014.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami, apa saja kebijakan yang dikeluarkan oleh Tiongkok melalui *China National Petroleum Corporation* (CNPC)?
2. Untuk mengetahui, memahami, Sejauh mana kebutuhan Tiongkok dengan suplai minyak Sudan?

3. Untuk mengetahui, memahami bagaiamana kebutuhan energi minyak Tiongkok dalam ketersediaan pasokan energi minyak Tiongkok Di Sudan?

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini selain untuk kepentingan akademik, penelitian ini juga dapat di jadikan sebagai sumber informasi atau bahkan, pengalaman khususnya bagi penstudi masalah-masalah hubungan internasional khususnya respon dari negara tiongkok atau dubes tiongkok yang akan melakukan peneletian terkait dengan topik tentang kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap kebutuhan suplai minyaknya di Sudan melalui *China National Petroleum Corporation* (CNPC) tahun 2011-2014 dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian terkait topik ini. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat memberi tambahan wawasan dan pengetahuan ilmu hubungan internasional.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Diharapkan dapat menambah ilmu, pengalaman dan kemampuan peneliti di bidang Ilmu Hubungan Internasional.
2. Dapat dijadikan bahan tambahan informasi dan studi empiris bagi akademis maupun masyarakat.
3. Sebagai sebagai bahan referensi bagi para penstudi Ilmu Hubungan Internasional, dan umum.
4. Sebagai bahan referensi bagi lembaga akademik yang mengambil program Kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap kebutuhan energi minyaknya di

Sudan melaui *China National Petroleum Corporation* (CNPC) tahun 2011-2014.

5. Sebagai bahan untuk mahasiswa tentang kebijakan luar negeri Tiongkok dalam kebutuhan energi minyak di Sudan melaui *China National Petroleum Corporation* (CNPC) tahun 2011-2014.